

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar sejatinya merupakan konflik menahun dengan catatan sejarah yang cukup panjang. Etnis Rohingya yang dianggap sebagai kelompok pendatang tidak pernah diterima dengan baik selayaknya penduduk asli Myanmar. Hal ini semakin diperkuat dengan motif-motif rasial dan agama yang dianut oleh etnis Rohingya yang berbeda dengan etnis-etnis lain di Myanmar pada umumnya. Etnis Rohingya merupakan kelompok keturunan bangsa Bengali dan menganut kepercayaan agama Islam. Sementara itu, Myanmar merupakan negara yang sangat kental dengan kepercayaan Buddha melalui kebijakan Burmanisasi-nya dan hanya menganggap agama tersebut sebagai kepercayaan yang sah.

Beberapa kali konflik sebagai buah dari penolakan dan ketidaksukaan penduduk Myanmar (terutama oleh etnis Rakhine sebagai penduduk asli Arakan, daerah tempat etnis Rohingya menetap) terhadap etnis Rohingya kerap terjadi. Intensitas konflik yang sangat tinggi berulang kali turut menarik perhatian pemerintah untuk turun tangan ikut berperan dalam konflik etnis ini. Namun, keikutsertaan pemerintah di dalamnya justru membuat kelompok etnis Rohingya semakin terpuruk.

Secara historis memang keberadaan etnis Rohingya di Myanmar tak pernah diakui oleh pemerintah (Islam & Khatun, 2024). Dengan tidak mendapatkan pengakuan tersebut dari pemerintah bahkan menjadikan kelompok Rohingya tidak tepat dikatakan sebagai sebuah kelompok etnis. Pemerintah Myanmar mengklasifikasikan kelompok Rohingya sebagai imigran ilegal, meskipun kelompok ini telah lama tinggal di wilayah Myanmar.

Stereotipe itu kemudian semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 yang berisi pengakuan terhadap 135 etnis di Myanmar sebagai warga negara yang sah, namun tidak termasuk etnis Rohingya di dalamnya (Haque, 2017). Berlandaskan pada kebijakan tersebut membuat etnis Rohingya tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak perlindungan sosial, serta hak mendapatkan pekerjaan.

Kebijakan tersebut juga memfasilitasi berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi yang ditujukan terhadap etnis Rohingya. Dinamika konflik dan penolakan kerap terjadi dari masa ke masa hingga mencapai puncaknya pada Juni 2012 lalu. Pasca konflik etnis tersebut, nasib etnis Rohingya kian menderitakan. Pemerintah Myanmar kala itu memainkan peranan yang sangat ekstrim dengan membunuh dan menghancurkan tempat tinggal dan fasilitas keagamaan mereka (Muhammad, 2012). Tak hanya itu, aksi pembunuhan tanpa pandang bulu kian mengindikasikan bahwa tragedi ini merupakan upaya pemusnahan terhadap populasi etnis Rohingya. Akibatnya, ketakutan yang teramat besar timbul pada etnis Rohingya yang tersisa sehingga mereka memutuskan untuk melakukan eksodus demi mencari tempat tinggal yang lebih aman dengan mengungsi ke negara-negara tetangga.

Seiring berjalannya waktu gelombang pengungsi Rohingya yang datang semakin banyak dan melebarluaskan destinasinya. Awalnya kembali ke Bangladesh merupakan solusi bagi mereka dalam upaya mencari tempat perlindungan yang aman. Setelah beberapa dekade berlalu pengungsi Rohingya telah merambah ke negara-negara tetangga lainnya seperti Thailand, Malaysia, India, hingga Indonesia. Dengan terjadinya fenomena ini turut menandai bahwa isu Rohingya telah menjadi isu internasional yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Urgensi tersebut mengundang

berbagai pihak (termasuk ASEAN dan PBB) untuk melakukan upaya demi kemajuan terhadap isu ini, namun upaya tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal (Barber & Teitt, 2021).

Pemerintah Myanmar tentu menjadi pihak paling sentral dalam upaya penyelesaian terhadap isu Rohingya. Masalahnya, seperti yang telah disampaikan di atas, pemerintah Myanmar dari masa ke masa tak kunjung memberikan penanganan yang sesuai demi terselesainya konflik dengan tensi yang telah memanas sedari lama ini. Resistensi terhadap kelompok etnis Rohingya terus dilakukan dan tak memberi celah sedikit pun.

Hal ini mengakibatkan berbagai kecaman dan tekanan secara masif diberikan oleh dunia internasional kepada pemerintah Myanmar yang sedang berkuasa. Publik menuntut sikap yang solutif dari pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan isu yang ada dan memberikan perlakuan yang layak kepada etnis Rohingya.

Salah satu pihak yang paling awal dan cukup konsisten mengkritik serta mengecam pemerintah Myanmar ialah sebuah organisasi bernama *Human Rights Watch* (HRW). Organisasi ini merupakan sebuah organisasi *non-profit* non-pemerintah (NGO) yang telah lama dan berpengalaman melakukan penelitian serta menginisiasi dunia internasional untuk membuka mata dalam berbagai upaya penanganan terhadap isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Desakan ini kemudian berkembang menjadi satu langkah lebih serius dalam bentuk diplomasi kemanusiaan. Melalui berbagai *platform media* yang dimiliki, laporan serta kampanye dari *Human Rights Watch* terkait isu etnis Rohingya membuat mata dunia terbuka. Hanya saja upaya ini masih belum memberikan hasil yang begitu berarti disebabkan pemerintah Myanmar benar-benar tidak mendengarkan suara dari pihak luar. Namun tentunya dengan segala pengalamannya hal ini tak serta-merta membuat HRW mengurungkan niatnya. Secara konsisten,

HRW telah memulai aksi diplomasi kemanusiaannya ini sejak tahun 1998 (Human Rights Watch, 2012b).

Rapor *Human Rights Watch* dalam melakukan diplomasi kemanusiaan pun tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam perjalanannya *Human Rights Watch* telah terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan penting di dunia, seperti pembebasan penahanan terhadap imigran di Kanada, mengatasi kebijakan terhadap rasisme di Brazil, penghukuman terhadap panglima perang Kongo, dan masih banyak lainnya.

Kini setelah pemerintahan Myanmar diakuisisi oleh militer membuat kondisi warga etnis Rohingya semakin tidak dipedulikan serta diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik aktor negara maupun aktor non-negara semakin menemui tantangan. Kekacauan internal yang terjadi di Myanmar sebagai buah dari bentuk tidak terimanya rakyat Myanmar setelah militer berkuasa seolah mengalihkan perhatian pemerintah. Kasus krisis kemanusiaan dan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi menjamur di Myanmar dan tidak hanya terjadi pada komunitas etnis Myanmar melainkan kepada siapa saja yang protes dan melakukan demonstrasi terhadap pemerintah.

Meskipun begitu upaya diplomasi kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak dasar etnis Rohingya tetap dilakukan oleh *Human Rights Watch*. Melalui penelitian ini, penulis memaparkan bagaimana diplomasi kemanusiaan HRW ini dijalankan dalam penelitian yang berjudul **“Diplomasi Kemanusiaan *Human Rights Watch* (HRW) dalam Mengadvokasi Hak Etnis Minoritas Rohingya.”**

2. 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi diplomasi kemanusiaan *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengadvokasi hak etnis minoritas Rohingya?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi pada upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengadvokasi hak etnis minoritas Rohingya?

3. 1.3 Fokus Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada, untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini perlu ditetapkan fokus penelitian agar diperoleh informasi dan data yang jelas terhadap aspek-aspek yang diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Analisis strategi diplomasi kemanusiaan *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengadvokasi hak minoritas etnis Rohingya.
2. Analisis tantangan dan hambatan yang dihadapi pada upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengadvokasi hak etnis minoritas Rohingya.

4. 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Mengacu pada rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi diplomasi kemanusiaan *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengadvokasi hak etnis minoritas Rohingya.

2. Mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi pada upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengadvokasi hak etnis minoritas Rohingya.

5. 1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoretis

Studi ini dapat memperkaya teori-teori terkait dengan bentuk-bentuk diplomasi, meliputi strategi yang digunakan serta tantangan yang dihadapi. Studi ini juga dapat memberikan informasi terkait bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk membantu salah satu kelompok etnis paling rentan di dunia. Menjadi bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai upaya diplomasi kemanusiaan *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengadvokasi hak-hak minoritas etnis Rohingya.

1.5.2 Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan terkait peranan diplomasi kemanusiaan organisasi non-pemerintah HRW dalam mengadvokasi hak-hak etnis minoritas Rohingya.
- b. Bagi para akademisi maupun mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila memiliki keinginan melakukan penelitian terkait upaya diplomasi kemanusiaan, isu kelompok etnis Rohingya dan peranan organisasi non-pemerintah *Human Rights Watch* (HRW).
- c. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman.

